

SEKILAS APBN

Budget Issues Quick Response

SAHKAN GOLDEN VISA: AKANKAH INVESTASI ASING NAIK?

Emillia Octavia & Ricka Wardianingsih



Pada akhir Agustus 2023, pemerintah mengesahkan kebijakan golden visa bagi investor asing melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 tahun 2023 mengenai Visa dan Izin Tinggal. OECD menyebutkan bahwa golden visa merupakan kebijakan yang diberlakukan oleh suatu negara melalui mekanisme pemberian fasilitas izin tinggal kepada warga negara asing melalui investasi atau membayar sejumlah biaya tertentu. Kebijakan golden visa di Indonesia salah satunya diberikan kepada investor asing perorangan maupun korporasi yang berencana mendirikan perusahaan maupun menanamkan modal di Indonesia.

Bagi investor asing yang ingin mendapatkan golden visa dan izin tinggal selama 5 tahun harus mendirikan perusahaan di Indonesia dengan nilai investasi sebesar USD2,5 juta. Sementara itu, investor asing yang ingin mendapatkan golden visa dan izin tinggal selama 10 tahun harus melakukan investasi sebesar USD5 juta. Bagi investor asing perorangan yang ingin mendapatkan fasilitas golden visa dan izin tinggal selama 5 tahun di Indonesia namun tidak mendirikan perusahaan harus menempatkan dana senilai USD350 ribu yang bisa digunakan untuk membeli obligasi pemerintah, saham di perusahaan terbuka, maupun reksadana. Sedangkan bagi investor asing perorangan yang ingin mendapatkan golden visa serta izin tinggal selama 10 tahun namun tidak bermaksud mendirikan perusahaan harus menempatkan dana senilai USD700 ribu. Mengacu pada data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), selama tahun 2018 sampai tahun 2022, nilai investasi asing atau foreign direct investment mengalami peningkatan yaitu dari Rp392,7 triliun menjadi Rp654,4 triliun.

Namun, jika dilihat dari proporsi investasi asing terhadap total investasi terlihat bahwa proporsinya menurun selama tahun 2018 sampai 2022 yaitu dari 54,4 persen menjadi 54,2 persen. Dalam laporan Indonesia Economic Prospect edisi Juni 2023 yang dikeluarkan oleh World Bank disebutkan bahwa kontribusi foreign direct investment terhadap produk domestik bruto dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami penurunan dan diproyeksi mengalami stagnasi hingga 2 sampai 3 tahun ke depan. Dengan adanya pemberlakuan kebijakan golden visa diharapkan dapat meningkatkan investasi asing ke Indonesia seperti yang dinyatakan oleh Kepala BKPM dimana target investasi asing untuk tahun 2023 sebesar Rp1.400 triliun.

Sebelum Indonesia, sudah ada negara-negara lain yang melakukan kebijakan golden visa dalam rangka meningkatkan investasi asing masuk antara lain Spanyol, Kanada, Italia, Portugal, Jerman, Thailand, Amerika Serikat. Jika dilihat dalam lima tahun sejak diberlakukannya kebijakan golden visa, investasi asing di negara-negara tersebut telah mengalami peningkatan. Kondisi yang berbeda terjadi di Italia dan Portugal dimana investasi asing di negara tersebut cenderung menurun dalam periode lima tahun sejak diterapkan golden visa.

Melalui kebijakan golden visa, investasi asing yang masuk berpotensi mengalami peningkatan dan dapat berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru. Kebijakan golden visa juga berpotensi menciptakan transfer ilmu dan teknologi dengan masuknya investor asing. Namun di sisi lain, kebijakan golden visa juga dapat memberikan implikasi negatif yaitu kerentanan aliran investasi yang masuk dan mudah dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perubahan pasar global, adanya skema investasi yang lebih menarik yang ditawarkan oleh negara lain. Hal tersebut akan berdampak pada capital outflow dimana investor dapat menarik investasinya sewaktu-waktu dan memindahkan investasinya ke negara lain yang memiliki skema investasi yang lebih menarik.

Implementasi golden visa perlu dibarengi dengan upaya-upaya lainnya sehingga dapat mencapai sasaran dalam mendorong investasi asing. Komisi VI DPR RI perlu mendorong BKPM untuk berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan kemudahan aspek perizinan berusaha, penyediaan tenaga kerja yang berkualitas dan memastikan keamanan dalam negeri yang mendukung investasi.